

SKRIPSI

**STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERKELANJUTAN
SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA KARAMA,
KAB. POLEWALI MANDAR**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 pada Program
Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas

Sulawesi Barat



Disusun Oleh :

AMALIAYANTI

D0320314

PROGRAM STUDI

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE 2025

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERKELANJUTAN
SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA KARAMA, KAB.
POLEWALI MANDAR

SKRIPSI

Oleh :

AMALIAYANTI

D0320314

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Sulawesi Barat

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota

Tanggal 22 Mei 2025

Mengetahui :

Pembimbing 1


Sri Apriani Puji Lestari, S.T.,M.T

NIP. 19880416 202203 2 008

Pembimbing 2


Ir. Rafid Mahful, S.T.,M.Eng

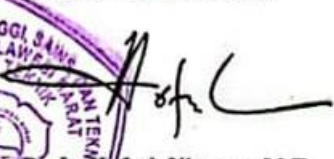
NIP. 19930106 202203 1 010

Koordinator Program Studi


Ade Mulawarman, S.T.,M.Si

NIP. 19870621 201903 1 007

Dekan Fakultas Teknik


Dr. Ir. Hafsa Nirwana, M.T

NIP. 19640405 199003 2 002

PERYATAAN HASIL KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amaliyanti

Nim : D0320314

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Majene 22 Mei 2025



Amaliyanti

Nim D0320314

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan ekonomi merupakan suatu pengembangan dalam mewujudkan tingkat produktif nasional menjadi optimal. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang meningkatkan produksi per kapita, harus didukung dengan adanya suatu pembangunan berkelanjutan. Dimana pembangunan berkelanjutan dalam upaya pengembangan ekonomi membantu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fisik dan emosional. Menurut (Fadhilla, n.d.) Fadhilla (2020), keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) merupakan salah satu faktor yang penting untuk keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan didefinisikan sebagai meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memelihara sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Porter (2006) menyatakan bahwa lingkungan yang berkelanjutan dapat meningkatkan ekonomi suatu wilayah.

Daerah pesisir adalah daerah dengan nilai strategi untuk Pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rentan terhadap kerusakan dan kehancuran. Oleh karena itu, baik dalam jangka pendek dan panjang, itu harus diatasi dengan hati-hati dengan memberikan manfaat ekonomi sebanding dengan manfaat lingkungan. Konsep manajemen area pesisir berfokus pada fitur regional pantai. Strategi dan pedoman didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatan (Febianto, 2014).

Desa Karama merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Manjopai, Dusun Karama dan Dusun Lambe, memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.605 jiwa (RPJM Desa Karama tahun 2023. Desa ini memiliki beberapa potensi berupa potensi alam, perikanan tangkap dan budaya. Potensi alam berupa kekayaan laut dan keindahan pasir putih sepanjang pantai desa Karama. Serta memiliki potensi pariwisata yang berupa objek wisata Bahari. Potensi perikanan tangkap dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar produksi perikanan tangkap tingkat Kab. Polewali Mandar pada tahun 2021 paling tinggi pada Triwulan III, yaitu sekitar 8.399,41 ton, dan paling rendah pada Triwulan IV yaitu sekitar 5.752,83 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap tingkat Kecamatan Tinambung tahun 2021 dalam kurun 2 tahun terakhir mengalami peningkatan pada

produksi perikanan hasil laut yaitu pada tahun 2020 sekitar 5.154,78 ton dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 5.402,15 ton. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karama tahun 2023, Desa yang berlokasi di wilayah pesisir ini memiliki sekitar 1.502 penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Masyarakat dapat menghasilkan sekitar 1.500 – 2.000 ton hasil tangkapan ikan tiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, saat ini angka kemiskinan penduduk Kecamatan Tinambung mencapai 2.106 jiwa, Penerima Keluarga Harapan mencapai 891 dan penerima rastra mencapai 1.345 jiwa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ciccimanaf (2021), menyatakan bahwa permasalahan yang ada di Desa Karama berupa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir hidup dalam keadaan yang kurang baik terlihat dari keadaan lingkungan tinggal, banyaknya anak-anak yang putus sekolah serta lingkungan pesisir yang tercemar sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan pantai berupa abrasi pantai, kerusakan hutan bakau, kerusakan terumbu karang, pengurangan sumber daya penangkapan ikan dan fasilitas penangkapan ikan di Desa Karama masih hidup di batas kemiskinan yang mengakibatkan hasil yang didapatkan tidak maksimal. Akibat adanya kerusakan lingkungan ini dapat mempengaruhi penurunan pendapatan ekonomi sehingga berdampak pada perkembangan dan kemajuan desa. Untuk itu, diperlukan manajemen khusus yang mempertimbangkan lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, menjaga kelestariaanya, namun dapat menyeimbangkan dengan ekonomi (Todaro, 2006).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian ini untuk merumuskan strategi pengelolaan lingkungan pesisir sesuai dengan kaidah keberlanjutan yang baik sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi dengan mengangkat judul penelitian yaitu strategi pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan sebagai upaya pengembangan ekonomi Desa Karama, Kab. Polewali Mandar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pengelolaan lingkungan pesisir pantai yang ada di Desa Karama?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan lingkungan pesisir yang ada di Desa Karama?
3. Bagaimana strategi pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kab. Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi pengelolaan lingkungan pesisir pantai yang ada di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kab. Polewali Mandar
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pengelolaan lingkungan pesisir di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kab. Polewali Mandar
3. Merumuskan Strategi pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kab. Polewali Mandar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara akademis agar bisa menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan pesisir pantai secara berkelanjutan.

2. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan.

3. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup penelitian di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi merupakan pembatasan materi pembahasan yang menjadi koridor pokok pembahasan. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup substansi dikemukakan berdasarkan tujuan penelitian yaitu ;

- a. Pengidentifikasian upaya pengelolaan lingkungan yang ada di Desa Karama.
- b. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pengelolaan lingkungan di Desa Karama.
- c. Perumusan strategi pengembangan ekonomi melalui pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan di Desa Karama.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat literatur yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran serta rumusan masalah yang akan diteliti serta penjabaran penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, variabel penelitian dan kerangka penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Gambaran umum wilayah Desa Karama sebagai wilayah penelitian, tahapan dan analisis diantaranya Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis SWOT.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diambil melalui hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Lingkungan Pesisir

Lingkungan pantai adalah area transisi yang menggabungkan ekosistem darat dan ekosistem laut, yang rentan terhadap perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia di darat dan di laut. Definisi daerah pesisir dilakukan dalam tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif dan pendekatan perencanaan. Menurut aspek administrative adalah daerah dimana batas terluar dari hulu atau kota terletak secara administrative, dan telah dihapus hingga 12 mil dari negara bagian atau 1/3 dari 12 mill distrik/kota. Menurut aspek perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab (Rasyid, 2014).

Secara alamiah potensi lingkungan pesisir di daerah ini digunakan secara langsung oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan pantai menggunakan banyak kekayaan laut termasuk ikan, rumput laut dan terumbu karang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak cukup menggunakan potensi pantai dalam skala besar untuk membuat manfaat ekonomi yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan pesisir untuk perusahaan komersial besar hanya dilakukan di sebagian Kabupaten dan Kota di wilayah pesisir. Secara umum, ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak disektor pariwisata. Sesuai dengan implementasi otonomi lokal, Pemerintah Daerah akan berusaha untuk menggunakan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah (Pieter, 2014).

Peraturan sumber daya alam yang berkelanjutan tidak memenuhi penggunaan dan kendali lokal terhadap lingkungan pesisir yang diterapkan oleh pemerintah wilayah setempat. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kalangan dunia usaha selama ini sebagian besar 10 menjadi kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.

2.2 Pengelolaan Lingkungan

Menurut Munadjat (2019), lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Soemarwoto (2019), lingkungan diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak sebagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Berikut pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:

- a) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b) Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
- d) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
- e) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideology, bahasa, dan lain-lain.
- f) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

a. Kerusakan Lingkungan

Menurut Soemartono (1991) faktor penyebabnya bentuk kerusakan lingkungan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) Kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam. Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak porandakan bumi serambi mekah dan nias,serta gempa 6,5 skala richter yang meratakan kawasan Lombo dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi.
- b) Kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Contohnya, penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan), perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbun rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah disembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS), pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan diluar batas.

2.3 Upaya Pengelolaan lingkungan Pesisir

Pengelolaan lingkungan pesisir adalah sebuah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sebuah lingkungan pesisir pantai yang dikelola oleh masyarakat yang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan pesisir pantai. Dengan berjalannya pengelolaan lingkungan pesisir pantai dengan baik maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pesisir pantai. “ Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

- a) Perencanaan Wilayah Pesisir pantai

Perencanaan lingkungan pesisir pantai adalah awal dari proses penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan lingkungan pesisir pantai. Di dalam perencanaan lingkungan pesisir pantai sangat perlu dibuat karena lingkungan pesisir pantai adalah wilayah yang melibatkan langsung dua ekosistem yaitu laut dan darat sehingga dengan perencanaan maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau ketidaksesuaian antara potensi yang dimiliki pesisir pantai dengan pemanfaatan lahan pesisir pantai yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah

b) Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai

Pemanfaatan lahan pesisir Pantai adalah menggunakan potensi yang ada pada lahan dikelola secara perseorangan ataupun kelompok. Pemanfaatan lahan pesisir hendaknya mengacu pada perencanaan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga pemanfaatan sesuai dengan potensi yang ada pada lahan pesisir pantai dan pemanfaatan bisa maksimal sehingga bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pengelolaan lahan.

c) Pengendalian dan Pelestarian Daerah Pesisir Pantai

Pengendalian lahan pesisir Pantai adalah suatu proses pengawasan lahan pesisir Pantai agar Kawasan wilayah pesisir Pantai tetap terjaga dari berbagai kerusakan baik yang diakibatkan oleh alam ataupun dari ulah manusia. Perlindungan dan pelestarian daerah Pantai bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya Pantai termasuk ekosistem/lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh alam maupun tindakan manusia.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

d) Penataan Kawasan Wilayah Pesisir

Penataan Kawasan wilayah pesisir merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengembangkan wilayah pesisir dan laut secara efektif dan efisien. Penataan Kawasan sesuai dengan fungsinya dimaksudkan untuk menentukan berbagai pada ruang yang tepat sesuai dengan kapasitas lahan dan kesesuaian lahan, sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi, efektif dan efisien, tidak sembarangan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Kinerja yang tinggi dalam diupayakan

melalui dukungan rencana umum tataruang Kawasan wilayah pesisir, yang bertujuan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktifitas dengan laju pertumbuhan yang tinggi (Andisasmito,2013).

Dengan adanya penataan kawasan pesisir maka perlu adanya pengawasan serta pengamatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk melihat potensi suatu daerah Kawasan pesisir yang ada. Oleh karena itu pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab harus atas penyusunan Rencana umum tataruang wilayah pesisir sebagai salah satu faktor dasar untuk mencapai keberhasilan Pembangunan wilayah maritime dan Pembangunan wilayah pesisir.

2.4 Upaya pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan

Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologi dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan Pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya alam, sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan Pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil Pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan msyarakat dan pengembangan kelembagaan (Fabianto, 2016).

Pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan didefinisikan sebagai pengelolaan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Soemarwoto, 2019).

2.5 Faktor penghambat dan Pendukung pengelolaan Lingkungan Pesisir

Menurut Daulay (2018), pengelolaan lingkungan pesisir adalah usaha untuk menjaga, merawat, dan mengelola pesisir pantai agar tetap berkelanjutan dan lestari. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan lingkungan, yang dapat memengaruhi keberhasilan upaya tersebut. Berikut adalah beberapa faktor tersebut :

- a. Faktor pendukung
 1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan pesisir dan kepedulian yang memadai tentang masalah lingkungan pesisir dapat menjadi faktor pendukung utama dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat yang sadar akan lingkungan pesisir cenderung lebih proaktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir.

2. Peraturan dan kebijakan lingkungan

Adanya regulasi dan kebijakan lingkungan yang ketat dapat mendorong perusahaan dan individu untuk bertindak secara berkelanjutan. Ini termasuk perizinan lingkungan, dan hukuman atas pelanggaran lingkungan.

3. Teknologi dan inovasi

Kemajuan dalam teknologi dan inovasi dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Teknologi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan atau teknologi pengolahan lingkungan, dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan pesisir.

4. Kerjasama Internasional

Masalah lingkungan sering kali lintas batas. Kerjasama internasional dalam pengelolaan lingkungan, seperti perjanjian iklim global, dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan yang bersifat global.

b. Faktor penghambat

1. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan

Ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan pesisir atau ketidaktahuan tentang masalah lingkungan dapat menghambat upaya pengelolaan lingkungan pesisir.

2. Korupsi

Korupsi dalam sistem perizinan, penegakan hukum, atau pengelolaan lingkungan dapat menghambat usaha untuk menjaga lingkungan pesisir. Korupsi dapat memungkinkan pelanggaran lingkungan tanpa hukuman.

3. Kurangnya peraturan atau penegakan hukum yang tidak efektif

Kurangnya peraturan yang ketat atau penegakan hukum yang lemah dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan atau individu untuk merusak lingkungan tanpa konsekuensi serius.

4. Konflik politik dan sosial

Konflik politik atau sosial dalam suatu negara atau wilayah dapat menghambat pengelolaan lingkungan karena sumber daya dan perhatian pemerintah teralihkan dari masalah lingkungan.

Selain faktor pendukung dan penghambat yang jelaskan oleh Bukori, perspektif tambahan terkait dengan faktor pendukung dan penghambat diidentifikasi melalui studi yang dilakukan oleh Widi (2018) yaitu:

a. Faktor pendukung

1. Kuatnya komitmen dari pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan pesisir.

Komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan tindakan konkret dan kebijakan yang mendukung upaya dan meningkatkan pengelolaan lingkungan.

2. Daya tangkap masyarakat yang positif terhadap pengelolaan lingkungan pesisir

Daya tangkap masyarakat mengacu pada kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk memberikan respon yang positif terhadap upaya pengelolaan lingkungan pesisir dan sejauh mana masyarakat dapat memahami, mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan serta kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan.

b. Faktor penghambat

1. Permasalahan anggaran

Permasalahan anggaran menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pengelolaan lingkungan, hal ini merujuk pada kendala atau tantangan yang timbul pada saat melaksanakan program atau kebijakan lingkungan, terutama terkait dengan alokasi, penggunaan atau keterbatasan dana yang tersedia.

2. Banyaknya investor yang tidak sadar akan lingkungan

Banyaknya investor yang tidak memiliki kesadaran atau perhatian yang memadai terhadap isu-isu lingkungan dalam konteks pengelolaan lingkungan. Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif karena kurang peduli terhadap dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan atau degradasi lingkungan yang signifikan

2.6 Kebijakan Undang-Undang Mengenai Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Penetapan dan pengelolaan suatu kawasan perlu adanya peraturan yang menguatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat. Peraturan yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan kawasan konservasi antara lain :

- a. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 18 Ayat 3 menyatakan bahwa kewenangan bidang kelautan dan perikanan bagi daerah Kabupaten yaitu seluas 4 mil laut atau 1/3 dari wilayah perairan propinsi (12 mil). Kewenangan-kewenangan dimaksud meliputi : eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut ; pengaturan kepentingan administrasi; pengaturan tata ruang ; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah ; bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
- b. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang ini bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- c. Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Klasifikasi penataan ruang dijelaskan pada Pasal 4 bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis Kawasan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kawasan konservasi yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat 8 adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Kewenangan pengelolaan kawasan yang dimaksud pada Pasal 24 dapat dilaksanakan oleh :

1. Pemerintah untuk kawasan konservasi nasional

2. Pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi provinsi dan
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kawasan konservasi kabupaten/kota.

2.7 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
Andi Hajrah 2016	Pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan bagi pengembangan Kawasan pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kab. Takalar	1. Mempertahankan urbanisasi 2. Kebijakan <i>top-down</i> dan kemitraan 3. Memperkuat kerangka kerja kelembangaan	• Observasi Lapangan • Studi Literatur	Analisis Kualitatif	1. Program pengembangan masyarakat dalam rangka menurunkan kemiskinan di pedesaan dilakukan dengan pengembangan industri yang seimbang, sehingga mampu mempertahankan urbanisasi, pelestarian lingkungan dan penguatan lembaga-lembaga maupun sarana dan prasarana. Dengan	Dalam konteks penelitian ini, perbedaan terlihat pada metode pengumpulan data yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan observasi lapangan

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					merealisasi melakukan kebijakan <i>top-down</i> secara horizontal yang mengikut sertakan masyarakat dan pemerintah. 2. Meningkatkan program proyek percontohan kebijakan publik dengan mendukung produksi pedesaan dalam tingkat persaingan, dengan memperkuat kelembagaan dan peningkatan informasi dan manajemen untuk masyarakat.	dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Namun dalam Teknik analisis data menggunakan metode yang sama.

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
Kasih Anggaraini, Nana Novita Pratiwi, Firsta Rekayasa Hernoviaty 2019	Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawa	• Ekonomi wilayah pesisir • Aspek lingkungan pesisir • Aspek kelembagaan	• Studi literatur kebijakan • Penelitian terdalu • Wawancara	Teknik Analisis Deskriptif Asosiatif	Hasil perhitungan IFAS menunjukkan nilai sumbu X yakni 0,66, sedangkan EFAS menunjukkan nilai sumbu Y yakni 0,63 dimana terletak di kuadran I yakni strategi S-O dengan arti potensi atau kekuatan wilayah pesisir Kecamatan Mempawah Hilir dapat dikembangkan dengan dukungan peluang atau kesempatan dari wilayah luar yang dapat mempengaruhi pengembangan wilayah pesisir tersebut. Strategi pengembangan ekonomi wilayah pesisir yang dapat dikembangkan adalah	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					industry pengolahan ikan berbasis masyarakat	
Sishadiyati, Mohammad Wahed 2020	Pengembangan Ekonom Lokal Di Kawasan Pesisir Kecamatan Buluk Surabaya	• Pengembangan ekonomi lokal • Kawasan pesisir	• Studi Literatur • Studi kepustakaan • Studi kepustakaan • Wawancara	• Analisis LQ	• Kecamatan Bulak ini mempunyai 10 sektor basis, sektor tersebut yaitu sektor pertanian dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,3, sektor industri pengolahan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2,2, sektor pengadaan air dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1, sektor konstruksi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,6, sektor transportasi dengan	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					indeks LQ rata-rata sebesar 1,6, sektor informasi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,2, sektor real estat dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1, sektor admin pemerintah dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2, sektor jasa pendidikan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,9, sektor perdagangan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2,1. sektor basis yang terakhir adalah sektor jasa	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					lainya dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,9. Sehingga sektor tersebut merupakan sektor basis dengan indeks rata-rata terbesar.	
Burhanuddin 2016	Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Ekonomi 2. Lingkungan hidup 3. Pembangunan berkelanjutan	Studi Literatur	Analisis Kualitatif	1. Pengintegrasian ekonomi dan lingkungan dalam konsep Pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung lingkungan sebagai sistem penopang kehidupan yang berfungsi sebagai	Dalam Penelitian ini ada kesaamaan antara variable dan analisis yang digunakan, namun terdapat perbedaan dalam Teknik pengumpulan data.

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					wadah jaringan kehidupan. Setiap Pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dalam hal ini ekonomi adalah subsistem dari lingkungan. 2. Koordinasi antara ekonomi dan ekologi berupaya mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Proses pengintegrasian keduanya adalah melalui perumusan	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					paradigma dan arah kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku Pembangunan dalam mengelola sumber daya yang optimal.	
Evi Purnama Wati (2018)	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan	1. Perlindungan lingkungan 2. Pengelolaan lingkungan 3. Pembangunan berkelanjutan	Observasi	Analisis Deskriptif	1. Pengelolaan lingkungan hidup dalam Pembangunan yang berkelanjutan, untuk itu perlu mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu dan terintegrasi antara	Dalam penelitian ini lebih menekankan upaya, faktor penghambat dan pendukung serta keberlanjutan lingkungan sedangkan penelitian

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					lingkungan laut, darat dan udara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negeri, kelestarian dan keberlanjutan, kelestarian dan keseimbangan, keterpaduan, keanekaragaman hayati, tata kelola pemerintah yang baik dan otonomi daerah.	terdahulu berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam Pembangunan yang berkelanjutan.

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					2. Peranan pemerintah menerapkan kebijakan sebagai Lembaga formal yang mengatur tata Kelola persediaan SDA yang ada di Indonesia menjadi hal yang penting sebagai landasan menjadi keseimbangan di masa yang akan datang, dengan menetapkan kebijakan serta UU yang tepat agar tercapainya pengelolaan SDA yang berkelanjutan.	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
Bima Kumara Dwi Atmaja dan Anggie Syahputra Rumahorbo (2023)	Implikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Berkelanjutan	1. Tindakan pencegahan 2. Penanggulangan kerusakan dan pencemaran 3. Pemulihan kualitas lingkungan	• Studi Literatur • Studi kepustakaan	Analisis Deskriptif	1. Dampak pengelolaan lingkungan hidup terhadap Pembangunan keberlanjutan. Dengan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan mengabaikan nilai-nilai lingkungan, tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, keselarasan, dan keterpaduan serta kepentingan umum. Dalam kondisi ekologi yang terdegradasi, ada istilah <i>irreversibility</i>	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan lingkungan untuk pengembangan ekonomi sedangkan penelitian terdahulu mengerah pada pengimplikasian pengelolaan lingkungan hidup terhadap Pembangunan berkelanjutan

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					dan entropi yang dapat diartikan sebagai ketidakteraturan. Kedua istilah ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus mempertahankan ketergantungan harmonis antara kegiatan manusia (termasuk perilaku dan praktik bisnis) dan ekosistem alam. 2. Penegakan instrument hukum pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembangunan	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					berkelanjutan. Hal ini dapat membantu menciptakan kepastian hukum dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penegakan instrumen hukum pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan cara	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					yang sejalan dengan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. 3. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Untuk mengimplementasikan gagasan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, beberapa kebijakan, program, dan inisiatif harus	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					dikembangkan dan didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan tambahan. Inisiatif ini termasuk mitigasi risiko dan polusi, serta pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum, keterlibatan masyarakat pada dasarnya melibatkan masyarakat yang lebih besar atau proses	

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					komunikasi dua arah yang berkelanjutan	
Asnuryati (2023)	Konsep Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa untuk : Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal	• Pengembangan ekonomi berkelanjutan • Pemberdayaan komunitas • Kemandirian ekonomi lokal	• Observasi lapangan • wawancara	Deskriptif kualitatif	Pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa memerlukan konsep yang holistik dan terintegrasi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, seperti kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan komunitas melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pengembangan ekonomi sangat penting untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal. Konsep	Pada penelitian ini terdapat persamaan pada teknis pengumpulan data yaitu teknik observasi dan wawancara namun ada perbedaan di mana dalam penelitian ini menekankan pada pengelolaan lingkungan sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada

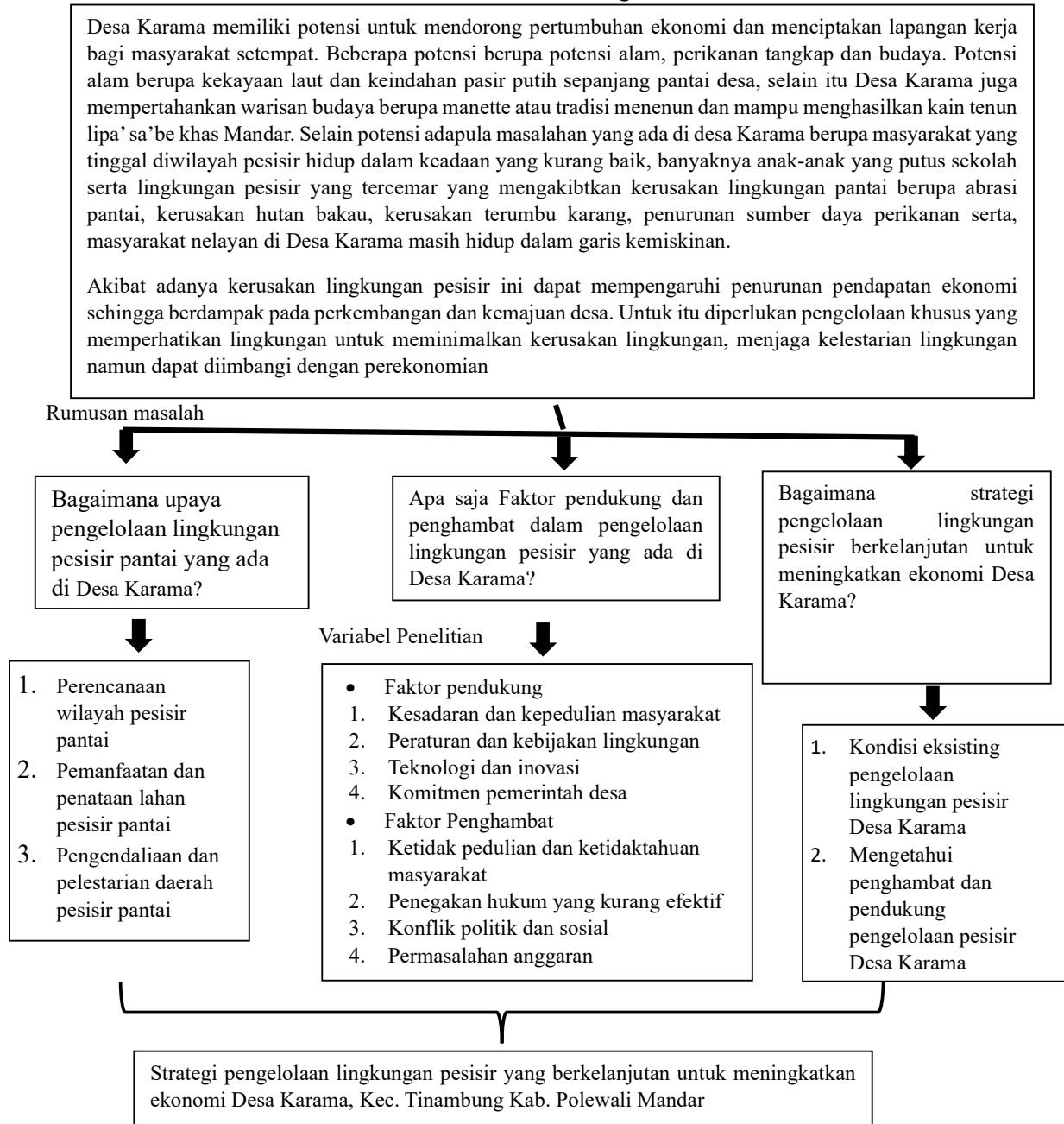
Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa yang didasarkan pada partisipasi dan pemberdayaan komunitas. konsep pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa melalui pemberdayaan komunitas dan kemandirian ekonomi lokal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa. Namun, dukungan dari pemerintah dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Tantangan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa	pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Hasil Analisis	Perbandingan
					harus diatasi melalui kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.	

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis kritis dan sistematika, sehingga menghasilkan satu bangan tentang hubungan variable dengan variable lainnya, oleh karena itu melihat dari permasalahan yang ada maka penelitian mencoba membuat skema kerangka berfikir yang sistematis.

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis Deskriptif Kualitatif, upaya pengelolaan lingkungan pesisir dan faktor penghambat dan pendukung pengelolaan pesisir dapat diketahui bahwa :

- a. Upaya pengelolaan lingkungan pesisir di Desa Karama sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah desa telah melakukan perencanaan wilayah, penataan dan pemanfaatan lahan wilayah pesisir serta pengendalian dan pelestarian wilayah pesisir pantai dengan membagi wilayah menjadi 3 zona, yaitu permukiman, tempat perahu nelayan dan wilayah wisata Bahari. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pengendalian dan pelestarian wilayah pesisir dengan program jumat bersih dan sosialisai kapada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan terbatasnya sarana prasarana pendukung.
 - b. Pengelolaan lingkungan pesisir di Desa Karama memerlukan upaya berkelanjutan yang melibatkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, penerapan peraturan dan kebijakan yang jelas, adopsi teknologi yang tepat, dan dukungan anggaran yang memadai. Kondisi sosial politik yang kondusif menjadi modal yang berharga untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi Desa Karama, harus melakukan

pengelolaan sumberdaya pesisir pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan, yaitu:

- a. Mengembangkan Kawasan wisata pesisir untuk meningkatkan ekonomi
- b. Selalu menjaga lingkungan dengan melakukan pelestarian dan pemeliharaan ekosistem pesisir
- c. Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir yang lainnya secara berkelanjutan agar ekonomi masyarakat pesisir meningkat.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Desa Karama meliputi:
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan lingkungan pesisir untuk mengembangkan ekonomi
 - b. Pemerintah dituntut untuk terus memperhatikan dan Menyusun peraturan yang jelas mengenai pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk larangan membuang sampah, sanksi bagi pelanggar dan aturan pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.
2. Kepada masyarakat di Desa Karama perlu meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan pesisir dengan mendukung program pemerintah, mengurangi pencemaran, memanfaatkan sumber daya pesisir, bertanggung jawab, serta membangun kerjasama dan gotong royong.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S., & Raharjo, B. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan. Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17764>
- Afrial Ningsih, Sherli, K., 2016. *Analisis Pengaruh Investor Attention Terhadap Return, Likuiditas dan Volatilitas Return Saham Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia 2012-2015*
<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/3856>
- Anggarini, M., 2019 *Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawa*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/viewFile/36883/75676583508>
- Atmaja, D. 2023 *Implikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Udayana
https://www.academia.edu/109961944/IMPLIKASI_PENGELOLAAN_LINGKUNGAN_HIDUP_TERHADAP_PEMBANGUNAN_KEBERLANJUTAN
- Asnuryati 2023 *Konsep Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa untuk Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal*, jurnal Vol.3 No. 2
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/529>
- Basuki, A., & Sulisty. 2006. Metode Penelitian. Jakarta : Wedatama Widya Sastra
<https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan>
data#:~:text=tersebut%20sebagai%20berikut!-,1.,tidaknya%20data%20dengan%20tujuan%20akhir.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2021. Polewali Mandar dalam angka Tahun 2021. Polman : Badan Pusat Statistik
<https://polewalimandarkab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/1cf679e29b5ab7e0c14ae2a8/kabupaten-polewali-mandar-dalam-angka-2021.html>
- Burhanuddin (2016) *Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 2 No. 1
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/565/482>

- Fabianto, M. D., dan Pieter, Th. B. 2014. *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat*. Jurnal Teknologi. Volume 11. Nomor 2. hal 1-7.
<http://repo.uinbukittinggi.ac.id/388/1/EKONOMI%20PEMBANGUNAN%201%20CETAK.pdf>
- Fadhilla.G 2020. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Pulau Jawa*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54492>
- Hajrah.A 2016 *Pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan bagi pengembangan Kawasan pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kab. Takalar*. UIN Alauddin Makassar
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/11129>
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). *Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come*. American Educational Research Assotiation, 33(Educational Researcher), 14–26.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X033007014#:~:text=Abstract,as%20they%20regularly%20practice%20it.>
- Kuncoro, M. 2012 *Perencanaan Daerah Membangun Ekonomi Lokal, Kawasan dan Kota*.
<https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19251>
- Lohanda, D. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
<https://media.neliti.com/media/publications/525076-none-601633fc.pdf>
- Maghfira 2023, *Hubungan audit lingkungan dengan pengendalian pencemaran di Kawasan pesisir pulau lae-lae* . Jurnal akuntansi Vol. 07, No. 01
<file:///C:/Users/HP/Downloads/728-Article%20Text-2127-1-10-20230602.pdf>
- Mardotillah, M., & Soemarwoto, R. (2019). *Septik Tank Komunal Sebagai Sumber Daya Bersama Dalam Upaya Memelihara Lingkungan*. Anthropolos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (*Journal of Social and Cultural Anthropology*), 5(1), 1-19.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/view/12562>
- Munadjat. D, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Binacipta, 2019.

<https://repository.umj.ac.id/11974/1/Diktat%20Hukum%20Lingkungan.pdf>

Manaf, C. Y. 2021. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tinambung Kab. Polewali Mandar. Manaf, C. Y. 2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 1238-1251.

<http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13048>

Neuman, W. L. (2003). *Metode Penelitian Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kelima. Boston: Pearson Education.

<Http://lib.unair.ac.id>

Pemerintah Desa Karama.2023. *Profil Desa Karama Tahun 2023*. Pemerintah Desa Karama, Polewali Mandar.

Putnan 2000, *Teori Konsep Modal Sosial*. Jakad Media Publishing.

https://link-springer-com.translate.google/chapter/10.1007/978-3-531-92646-9_3?error=cookies_not_supported&code=cac7cccf-94f7-42ab-94ee-4871f2b17785&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge

Rahman. Dkk 2022 *Analisis SWOT dalam merumuskan Strategi Pemasaran*. Jurnal ilmiah manajemen dan bisnis. Vol 5. No. 1

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/viewFile/14231/4216>

Rasyid, K, Nst., Darma, B., Rusdi, L. 2014. *Analisis Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu Di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara*. Fakultas Pertanian USU. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan. hal 12.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1431899&val=4129&title=ANALISIS%20PENGELOLAAN%20KAWASAN%20PESISIR%20SECARA%20TERPADU%20DI%20KABUPATEN%20SERDANG%20BEDAGAI%20SUMATERA%20UTARA%20Analysis%20of%20Integrated%20Coastal%20Management%20in%20Serdang%20Bedagai%20North%20Sumatra>

Septinar, H., Daulay, R. W., & Putri, M. K. (2018). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan Lingkungan terhadap kondisi di Bantaran Hilir Sungai Musi Kecamatan Gandus Kota Palembang*. Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi, 3(1), 43-48.

- <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/swarna/article/view/1710>
- Sishadiyati dan Wahed. 2020. *Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak Surabaya*. Jurnal Ilmu Administradi dan Manajemen Vol. 3 no. 2: hlm. 35-36
- <https://epository.upnjatim.ac.id/view/creators/Sishadiyati=3ASishadiyati=3A=3A.html>
- Soemartono, R.M 2019. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. URL : <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=82086>
Diakses pada tanggal 8November 2023
- Soemartono, R.M 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. URL : <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=82086>
Diakses pada tanggal 8November 2023
- Soegianto, 2010. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. URL : <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=1077&pRegionCode=UNHAS&pCientId=633>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan pengembangan (Research and Development)*. URL: <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/103770/metode-penelitian-pengembangan-research-and-development-r-d-.html>
Diakses pada tanggal 16 November 2023
- Sukmadinata, 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jurnal Ilmiah Informatika Bandung : PT Remaja Rosdakarya
<forum.upbatam.ac.id/index.php/jif/article/view/1968>
- Tini, K. 2016 *Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1430>
- Todaro, Michel P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi, edisi ke-9, jilid 1*). Jakarta : Erlangga
<http://repo.uinbukittinggi.ac.id/388/1/EKONOMI%20PEMBANGUNAN%201%20CETAK.pdf>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- wati 2018 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan*. Jurnal Vol. 3, No. 1

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2993367&val=26927&title=PERLINDUNGAN%20DAN%20PENGELOLAAN%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20YANG%20BERKELANJUTAN>

Widi, A.L (2018)*Faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan Pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan di Kota Batu*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Dionegoro.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/viewFile/527/443>